

KOPERASI WANITA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENUMBUHKAN EKONOMI KERAKYATAN DI KOTA MALANG

Aleria Irma Hatneny

Fakultas Ekonomi Unisma, Universitas Islam Malang

Email: aleriairmah@unisma.ac.id

Abstract: *SMEs and cooperative which is a reflection of the form of a populist economy experienced tidal dynamics. There is also a pessimistic view that the cooperative as a pillar of the national economy increasingly become limited jargon. The accumulation of wealth and economic power in some business entities becomes a challenge for SMEs and Cooperatives in general whether able to compete against private domination. Cooperative is one of the economic actors in addition to state-owned and private, although the contribution of cooperatives to GDP is still relatively small compared to the contribution of state-owned and private. Large number of cooperatives can not be considered one perspective because it holds great potential if managed optimally. In East Java, especially in the city of Malang, Cooperative's activities especially Women cooperative holds potency of power to regional economy. Women have distinctive characteristics and are able to play a role in managing the household and developing a family economy. This qualitative research which aims to describe and identify the implementation of women's cooperative programs by the Government and its implications on the empowerment of women and the populist economy in Malang. Processed data is primary data and secondary data. Data collection methods used were interviews of key informants, documentation and field observation. From the result of research and discussion, it can be concluded that there is a key role of women's cooperative management in Malang to the successful implementation of Government programs in the empowerment of its members, especially in developing the people's economy.*

Key words: *women cooperative, women empowerment, populist economy*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara kita dapat mempertahankan dan mengembangkan perekonomian dengan adanya kegiatan sektor riil. Berbagai kegiatan usaha berjalan sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing perusahaan yang bisa dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu perusahaan/bisnis skala besar atau raksasa, skala menengah dan skala kecil. Ketiga kelompok usaha tersebut bergerak di semua bidang/jenis kegiatan ekonomi (pertambangan, pertanian, perhotelan, perbankan, dan lain sebagainya juga manufaktur, perdagangan dan lain-lain).

Perkembangan yang ideal ialah apabila unsur-unsur dalam kelompok-kelompok tersebut saling menghidupi sehingga secara makro ekonomi dapat mendorong peningkatan GNP serta terjaminnya lapangan kerja. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa di antara unsur-unsur kelompok tersebut terdapat kelompok yang mempunyai kendala-kendala paling serius yakni kelompok usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus untuk membantu kelompok usaha tersebut.

Sementara itu, pembangunan ekonomi nasional sedang dan akan menghadapi perubahan fundamental yang berlangsung dengan cepat dan perlu kesiapan dari para pelakunya. Perubahan fundamental yang pertama terjadi di tingkat internasional yaitu proses globalisasi dengan perdagangan bebas dunia sebagai salah satu motor penggeraknya. Perubahan fundamental kedua terjadi di dalam negeri, yaitu berlangsungnya transformasi struktur perekonomian nasional dan peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti oleh perubahan pola konsumsi masyarakat. Perubahan-perubahan ini bersifat sangat mendasar, oleh karena itu menuntut perhatian untuk melakukan langkah-langkah strategis, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi justru

menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil dan menengah, yang jumlahnya sangat besar dan menjadi sandaran hidup sebagian besar rakyat Indonesia, untuk tumbuh dan berkembang secara alamiah, institusional dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan isu-isu tersebut, pemerintah menyadari akan pentingnya reformasi mendasar dengan menetapkan visi dan misi baru dalam pembangunan nasional khususnya yang menyangkut bidang-bidang ekonomi dan kelembagaan. Penjabaran visi di dalam misi pembangunan nasional dengan jelas menyebutkan, bahwa:

- Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil dan menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya manusia, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
- Perekonomian rakyat atau ekonomi rakyat berkaitan dengan pelaku ekonomi. Sedangkan sistem yang melingkupi kegiatan ekonomi rakyat tersebut adalah sistem ekonomi kerakyatan. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah usaha ekonomi yang menjadi sumber penghasilan keluarga atau orang per orang. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat berarti perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas dalam menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 33 UUD 1945 bahwa produksi ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dilaksanakan oleh semua dan di bawah penilikan (pemantauan) anggota-anggota masyarakat. Ekonomi kerakyatan ini dalam banyak segi tercermin dari usaha kecil dan menengah yang secara kuantitas meliputi \pm 90% usaha-usaha yang ada di Indonesia (jika mengikuti definisi Kadin).

Permasalahannya adalah bahwa era globalisasi perekonomian memaksa segenap komponen ekonomi nasional untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan meningkatkan daya saing, sehingga permasalahan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk menghapus kemiskinan dan kesenjangan sosial perlu dirumuskan dan dilaksanakan jika kita masih konsisten dengan cita-cita memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dilakukan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan teknologi.

Dalam konteks ini, pengembangan ekonomi rakyat seharusnya diarahkan atau berorientasi pada perubahan struktural dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Ada 3 pilar dalam pembangunan yang disebut sebagai trilogi pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga pilar tersebut mengikat keseluruhan pelaku ekonomi yang ada. Baik koperasi, swasta maupun BUMN ketiganya berkewajiban melaksanakan tugas-tugas trilogi itu. Adalah keliru jika memandang kemampuan koperasi hanyalah untuk menampilkan pemerataan. Dalam teori maupun kenyataan, koperasi mampu memperkenalkan kesadaran berekonomi, mampu menggerakkan sumber-sumber ekonomi (termasuk sumber daya manusia) yang masih belum atau kurang dimanfaatkan menjadi suatu kekuatan produktif yang menumbuhkan nilai tambah. Koperasi sebagai gerakan ekonomi partisipatif menyatupadukan potensi-potensi kecil yang terpisah-pisahkan menjadi kekuatan bersama yang lebih besar, menciptakan sinergi. Justru karena koperasi merupakan gabungan kekuatan-kekuatan kecil, pada tahap perkembangan tertentu masih akan terlalu kecil kemampuannya untuk melaksanakan tugas pemerataan ekonomi yang teramat besar yang ada di luar dirinya, apalagi dalam kadar kesenjangan ekonomi

skala nasional yang cukup parah. Karena merupakan bangun usaha partisipatif dan semangat kerjasama, maka peranan koperasi sesuai dengan tugas-tugas yang menyangkut stabilitas sosial.

Di pihak lain dalam kenyataannya usaha-usaha swasta memang telah membuktikan perannya dalam mendorong perekonomian, meskipun dalam periode resesi ia juga paling besar peranannya dalam menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi; bahkan terkadang membawa stagnasi dan depresi. Swasta dapat pula mengembangkan tugas pemerataan dengan memperluas lapangan kerja, melakukan pilihan teknologi yang tepat guna dan padat karya, memperluas keterkaitan kegiatan usaha dan menumbuhkan sinergi, membayar pajak progresif dan dengan kemampuan pertumbuhannya dapat lebih mampu membiayai proses demokratisasi. Meskipun menurut paham Demokrasi Ekonomi kita sebenarnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh berada di tangan swasta tetapi dalam kenyataan ketentuan itu tidak terlalu dipatuhi, sehingga swasta justru menjadi peka terhadap tugas-tugas menjaga stabilitas.

Bagi BUMN yang harus menyelenggarakan tugas-tugas menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, jelas peranannya sangat menonjol. BUMN telah dapat membuktikan peranannya di waktu lalu (maupun hingga saat ini) sebagai *agent of development*. Sebagai *leading and commanding sector*, dikatakan "Benteng Group" bagi swasta juga pernah lamban tumbuh. Tidak ada swasta besar, karena sesungguhnya perusahaan BUMN (seperti bank-bank milik negara) juga berperan terhadap pertumbuhan swasta. Jadi disamping menjaga stabilitas (karena peranan konstitusinya) BUMN telah berperan dalam pertumbuhan, baik pertumbuhan bagi dirinya sendiri maupun dalam hal menumbuhkan usaha swasta. Tidak sulit pula untuk menciptakan peranan dan membenahi tugas pemerataan bagi BUMN terutama BUMN perbankan.

Kerjasama antara koperasi, swasta dan BUMN dimungkinkan hanya apabila masing-masing mempunyai "penyebut" yang sama pula, meskipun pembilang berbeda. Untuk Indonesia ketiga pelaku ekonomi itu imperatif sama-sama terikat pada 33 UUD 1945, terikat paham demokratis ekonomi Indonesia, terikat oleh GBHN. Selama salah satu dari pelaku ekonomi itu tidak merasa mempunyai misi yang sama, ibaratnya menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Dengan demikian makin jelas pula bahwa tidak ada penkotak-kotakan misi makro bagi masing-masing pelaku ekonomi, yang ada hanyalah sekadar pembagian kerja.

Usaha skala kecil, menengah dan koperasi yang merupakan pencerminan dari wujud ekonomi kerakyatan mengalami dinamika pasang surut. Tidak sedikit koperasi yang harus di bubarkan oleh pemerintah karena bermasalah. Ada juga yang bermasalah hukum karena penyimpangan dana pinjaman bergulir bantuan Pemerintah. Bahkan ada upaya-upaya untuk mengubah asas dan watak dasar koperasi melalui UU tentang Koperasi No. 17 tahun 2012 yang berhasil dibatalkan dan kembali ke UU yang lama (UU No. 25 tahun 1992). Untungnya masih ada kesadaran yang kuat dari koperasi-koperasi yang ada akan asas, watak dasar koperasi. Masih terdapat pula pandangan pesimis bahwa Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional makin menjadi sebatas jargon. Setidaknya demikian menurut pandangan Menteri Keuangan Bambang PS Bordjonegoro melihat makin dominannya peran swasta dalam perekonomian nasional.

Terlepas dari masalah-masalah di atas tidak menyurutkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menggalakkan dalam pendirian dan bantuan modal bagi Koperasi. Khususnya Koperasi Wanita tercatat sepanjang tahun 2010 Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur telah menargetkan 4.250 koperasi wanita dari sejumlah 3.750 koperasi wanita yang sudah didirikan sepanjang 2009. Rupanya hal itu berangkat dari kesadaran bahwa Koperasi Wanita berfungsi secara tidak langsung sebagai penggerak ekonomi nasional di level akar rumput, serta menjadi wadah peningkatan kesejahteraan keluarga.

Apalagi di Kota Malang, sub sektor ekonomi ini merupakan motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki dampak langsung terhadap penyediaan lapangan kerja serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun dari segi jumlah, Koperasi Wanita masih kalah dengan Koperasi jenis lainnya akan tetapi tingkat kesehatan koperasi wanita relatif lebih baik dibandingkan koperasi lainnya. Tentunya

pemberdayaan anggota Koperasi Wanita yang notabene didominasi oleh ibu rumah tangga menyimpan potensi yang tidak bisa dianggap sebelah mata.

Untuk itu perlu untuk mengetahui secara mendalam bagaimana pemberdayaan anggota Koperasi Wanita yang mewakili gerakan pemberdayaan kaum perempuan. Bagaimana kiprah mereka dalam menyerap program dan kebijakan Pemerintah melalui Koperasi Wanita. Bagaimana juga eksistensi mereka terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan di Kota Malang.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Program Pemerintah terkait Koperasi wanita di Kota Malang?
2. Bagaimanakah perspektif koperasi wanita dalam menerima kebijakan terkait program pemerintah tentang koperasi wanita?
3. Bagaimanakah hasil implementasi program pemerintah tentang koperasi wanita terhadap pemberdayaan kaum perempuan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam upaya mengembangkan usaha Koperasi Wanita di Kota Malang yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak roda perekonomian di Kota Malang, perlu diperoleh informasi yang jelas, lengkap, komprehensif, dan mutakhir tentang Koperasi Wanita di Kota Malang agar peran kaum perempuan dapat ditingkatkan dalam rangka penumbuhan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan gambaran Implementasi Program Pemerintah terkait Koperasi wanita di Kota Malang
2. Mendeskripsikan penerimaan koperasi wanita terkait program pemerintah tentang koperasi wanita
3. Mengidentifikasi hasil-hasil implementasi program pemerintah tentang koperasi wanita terhadap pemberdayaan kaum perempuan.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang ditempuh adalah metode kualitatif deskriptif. Oleh Bogdan dan Buklen (dalam Arifin, 1994) dikatakan bahwa pendekatan kualitatif ini akan memudahkan interpretasi temuan data yang ada terutama untuk mendapatkan informasi secara mendalam berkaitan dengan aspek penelitian yang diteliti. Untuk mendapatkan kedalaman informasi maka peneliti fokus pada informan kunci bukan pada banyaknya sampel yang diambil. Selain itu karena masalah yang diteliti berkenaan tentang interaksi, organisasi dan perubahan sosial sehingga metode kualitatif dianggap lebih tepat.

Penelitian ini didesain dengan tujuan untuk menggali, mendeskripsikan, dan mengidentifikasi sesuai dengan rumusan masalah. Lokasi penelitian di kota Malang yang dipilih karena alasan yang dekat dengan domisili peneliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkannya.

2.2. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian bertujuan untuk mengarahkan penggalian data atau informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian (Moleong, 2000).

Fokus penelitian juga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang aspek-aspek yang diteliti. Berdasarkan atas rumusan permasalahan, tujuan dan konsep-konsep teori yang melandasi penelitian ini, serta kerangka konseptual, maka fokus penelitian ini mengamati beberapa hal antara lain:

1. Mendeskripsikan gambaran Implementasi Program Pemerintah terkait Koperasi wanita di Kota Malang.
 - a. Konteks, karakteristik dan perilaku pemerintah sebagai pembuat kebijakan
 - b. Konteks, karakteristik dan perilaku Dekopin, Dinas Koperasi Kota Malang dan Paguyuban Koperasi Wanita sebagai lembaga antara
2. Mendeskripsikan penerimaan koperasi wanita terkait program pemerintah tentang koperasi wanita dalam perspektif konteks, karakteristik dan perilaku Koperasi Wanita sebagai penerima program.
3. Mengidentifikasi hasil-hasil implementasi program pemerintah tentang koperasi wanita terhadap pemberdayaan kaum perempuan.
 - a. Hasil-hasil implementasi baik yang positif dan negatif
 - b. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi

2.3. Analisis Data

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri (Lincoln & Guba, 1985: Miles & Huberman, 1992). Peneliti sebagai suatu instrumen tidak berarti harus menghilangkan aspek kemanusiawianannya, tetapi kemampuan peneliti sebagai suatu individu dalam mengamati, bertanya, menelusuri dan mengabstraksi merupakan instrumen penting yang sangat utama. Oleh karena itu yang diperlukan dalam diri seorang peneliti sebagai alat penelitian adalah kemampuan atau kapasitasnya sebagai peneliti.

Bahwa penelitian kualitatif yang mempersyaratkan suatu keharusan bagi peneliti menjadi instrumen, memiliki konsekuensi psikologis terhadap peneliti untuk memasuki latar yang memiliki norma, nilai dan aturan serta budaya yang harus dipelajari dan dipahami peneliti. Sependapat dengan Moleong (2000:96-98) bahwa keberhasilan memasuki kancah penelitian antara lain disebabkan oleh akses dengan subjek yang mudah, budaya yang sama, bahasa yang sama serta peneliti mengenal betul lapangan sebagai kancah penelitian.

Interaksi antara peneliti dengan subjek yang diteliti dapat menimbulkan adanya interest dan konflik minat yang tidak diharapkan sebelumnya. Untuk menghindari terjadinya dampak yang tidak diinginkan, maka selama berlangsungnya penelitian ini, peneliti sebagai instrumen utama berusaha menggunakan prinsip-prinsip etika penelitian seperti memperhatikan, menghargai, menjunjung tinggi hak azasi informan, mengomunikasikan maksud penelitian kepada informan, tidak melanggar kebebasan dan tetap menjaga rahasia pribadi informan, tidak mengeksploitasi informan, mengomunikasikan hasil penelitian bila diperlukan, memperhatikan dan menghargai informan, dan penelitian dilakukan secara cermat sehingga tidak mengganggu aktivitas dan kebiasaan sehari-hari subjek penelitian.

Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara mendalam (*In depth interview*)
2. Dokumentasi
3. Observasi

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif

(*interactive model analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992: 15-20) yang terdiri atas tiga komponen analisis yaitu:

2.3.1. Reduksi Data

Reduksi Data, yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum,

dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung (Moleong, 2000:193-194).

2.3.2. Penyajian Data

Penyajian Data, yaitu merupakan tindakan untuk memudahkan melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dalam penyajian ini terdapat sejumlah informasi yang tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan, serta pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data ini dapat dalam bentuk tabel ataupun juga dalam bentuk narasi. Menurut Yin (2002) penyajian data dapat dilakukan dengan cara mengorganisasikan dan mendokumentasikan data yang terkumpul.

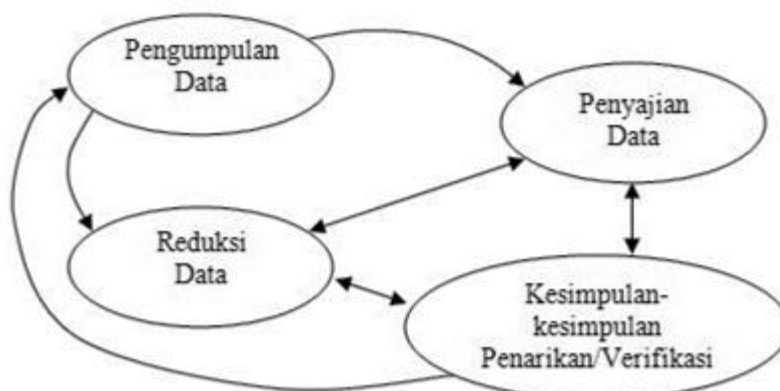
2.3.3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan/Verifikasi, yaitu adalah tindakan mencari arti atas berbagai fenomena yang telah terekam dalam penyajian data. Fenomena itu mungkin telah terekam dalam bentuk keteraturan, pola-pola, persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan dan sebagainya. Tindakan ini dilakukan verifikasi secara terus menerus selama proses pengumpulan data berlangsung, sampai ditemui adanya kesimpulan yang kokoh dan valid.

Gambar 3.1. Komponen analisis model interaktif

Sumber: Miles dan Huberman, (1992:20)

Berdasarkan model analisis interaktif, analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan



kesimpulan dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Tujuannya adalah fokus pengamatan yang diperkirakan penting serta relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dapat dipertajam dan diperdalam, sebab pengamatan tanpa analisis dan penafsiran tidak mungkin dapat mengetahui makna data (Lindolf, 1995: 215-219).

2.4. Keabsahan Penelitian

Untuk menjamin derajat keterpercayaan hasil penelitian, dari sejak awal perlu diupayakan menjaga keabsahan data yang telah dikumpulkan sebagai hasil penelitian. Ada beberapa teknik yang dapat ditempuh dalam pendekatan penelitian kualitatif di dalam menjaga keabsahan data tersebut.

2.4.1. Ketekunan Pengamatan

Hal ini dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci (Moleong, 2000). Jadi dalam hal ini dilakukan pengamatan mendalam terhadap persoalan atau isu yang sesuai dengan topik yang sedang dihadapi.

Untuk itu maka dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumennya, berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pengamatan pada setiap bagian yang ada pada kancan penelitian ini. Kegiatan pengamatan tersebut tentunya harus dilakukan berulang kali, atas berbagai topik yang sebelumnya diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan subjeknya.

2.4.2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2000).

Dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi ini. Data yang terhimpun melalui suatu wawancara dari suatu sumber dilakukan pengecekan ulang (wawancara silang) melalui sumber yang lainnya. Demikian pula data yang dihasilkan melalui suatu wawancara, dicek kembali kebenarannya melalui suatu observasi. Dengan dilakukan teknik seperti ini, diharapkan keabsahan dan keterpercayaan data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Program Pemerintah terkait Koperasi wanita di Kota Malang

Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur menganggap bahwa dalam konteks pasar bebas Asean Economic Community (AEC) di tahun 2015 menjadi tantangan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. Hal ini merupakan peluang bisnis sekaligus ancaman bagi Koperasi dan UMKM, baik dari sisi produk yang dihasilkan maupun Pemasaran produknya.

Pemerintah juga meyakini bahwa SME (*Small Medium Enterprise*) and Koperasi merupakan tulang punggung bagi kegiatan perekonomian yang positif. Karena ketika perekonomian dan industri negara maju mengalami kontraksi, justru negara-negara yang menyupport perekonomian mikro dan koperasi mampu bertahan dari goncangan global dengan baik. Hal itu juga diyakini secara global, jadi kegiatan perekonomian yang melibatkan UMKM dan koperasi saat ini bukan hanya jadi kiblat nasional dan Jawa Timur saja.

Masalah pembiayaan menjadi fokus perhatian utama sehingga melalui program dana hibah koperasi bergulir tahun 2009 salah satunya bertujuan untuk mengatasi hal itu. Untuk itu pemerintah secara serius membangun sistem kerja yang bisa difungsikan sebagai media untuk meningkatkan potensi Koperasi dan UMKM dalam mengatasi berbagai tantangan mulai dari hulu sampai hilir.

Keyakinan Pemprov Jawa Timur semakin diperkuat dengan adanya data statistik bahwa saat ini, kontribusi perekonomian Jawa Timur, 54,98 persen PDRB disumbang dari kegiatan Koperasi dan UMKM. Pada skala finansial didukung koperasi di Jawa Timur yang berjumlah 31 ribu lebih dan hampir 90% aktif, termasuk di dalamnya adalah Koperasi Wanita yang tidak bisa diangap sebelah mata.

Keyakinan-keyakinan tersebut kemudian dituangkan ke dalam kebijakan pemerintah Jawa Timur melalui program pemberdayaan kelompok-kelompok wanita di desa kemudian melalui bantuan pemerintah ditransformasikan ke dalam bentuk koperasi wanita. Terbukti kemudian bahwa kebijakan-kebijakan perkoperasian membawa Jawa Timur merupakan provinsi dengan perkembangan koperasi yang terbaik di Indonesia.

Implementasi pemerintah dalam mendorong kehidupan berkoperasi antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan Bimbingan

Bimbingan itu dengan maksud untuk menciptakan iklim dan kondisi yang memungkinkan gerakan koperasi akan tumbuh dan berkembang antara lain dengan jalan pendidikan dan penyuluhan

b. Menyelenggarakan Pengawasan

Dimaksudkan untuk menyelamatkan dan mengamankan kepentingan , baik bagi perkumpulan koperasi itu sendiri maupun pihak lain.

c. Pemberian Fasilitas

Fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah untuk koperasi dalam bentuk; pemberian sesuatu baik yang berupa uang, sarana ataupun jasa, pemberian keistimewaan baik yang berupa keringanan, ataupun kekuatan dalam lalu lintas hukum serta kebijaksanaan yang tersendiri tentang perkreditan termasuk syarat-syarat kredit yang mudah dan ringan untuk memajukan usaha-usaha koperasi, fasilitas dalam bidang produksi, distribusi dan sebagainya.

d. Perlindungan Pemerintah

Yaitu untuk memberikan pengamanan dan keselamatan kepentingan koperasi, serta memberi perlindungan nama koperasi agar nama koperasi tidak dipergunakan untuk maksud menyalahi asas dan sendi dasar koperasi dan nama baik koperasi.

Kewajiban pemerintah dalam mendorong perkembangan koperasi adalah memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan, dan fasilitas terhadap koperasi. Mendorong perkembangan koperasi bukan berarti pemerintah ikut campur tangan dalam urusan intern koperasi. Kebebasan gerak koperasi tetap terjamin sesuai dengan demokrasi ekonomi. Koperasi tetap mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur diri sendiri. Pemerintah hanya menetapkan kebijaksanaan, mengatur pembinaan, perlindungan dan pemberian fasilitas serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan koperasi.

Sebelum program koperasi digulirkan tahun 2009, tidak banyak koperasi wanita yang ada di kota Malang. Pemprov kemudian memprogramkan secara bertahap pembentukan koperasi-koperasi wanita yang berbadan hukum di setiap kelurahan. Sampai sekarang sudah lebih dari 8000 koperasi wanita di Jawa Timur yang lahir sudah berbadan hukum. Di Kota Malang sendiri ada 57 Koperasi Wanita, secara bertahap tahun 2009 ada 25 koperasi bentukan pakdhe Karwo dan sisanya 32 Koperasi wanita pada tahun 2010.

Yang mencirikan interaksi sosial di kopwan adanya pelaku-pelaku dalam hal ini anggota koperasi wanita. Tujuan kopwan tentunya mengacu pada UU perkoperasian. Dalam tata perekonomian Indonesia, fungsi koperasi diatur dalam UU NO.25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang perkoperasian. Program yang dicanangkan oleh pakdhe Karwo awalnya bertujuan untuk pemberdayaan wanita di daerah-daerah atau di pedesaan agar wanita bisa produktif. Untuk itu Pemerintah Jawa Timur melalui program pencanangan Pakdhe Karwo, berusaha bagaimana agar kelompok wanita yang dipedesaan yang belum mendapat pekerjaan mampu berdaya melalui pembentukan lembaga yang ditingkatkan statusnya sebagai koperasi.

Pemberdayaan melalui program program bimbingan teknis dan penyuluhan juga secara rutin dilakukan oleh dinas koperasi. Dinas koperasi juga aktif mendatangi koperasi-koperasi tersebut. Secara pertanggungjawaban dana hibah yang digulirkan sudah baik dalam arti hanya ada beberapa koperasi yang bermasalah akan tetapi bukan disengaja namun adanya kesalahpahaman mengartikan dana hibah koperasi.

Sekurang-kurangnya ada 3 lembaga yang mendukung pemberdayaan koperasi wanita; Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota melalui Dinas Koperasi dan UKM, dan Dekopin. Serta tambahan dukungan dari paguyuban bagi koperasi-koperasi yang bernaung di bawahnya. Peran masing-masing lembaga antara lain:

1. Pemerintah provinsi sudah menggulirkan bantuan modal sebanyak 2 periode masing-masing periode 25 juta untuk tiap koperasi.
2. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi Dan UKM juga aktif melakukan kegiatan berupa bimbingan teknis, pelatihan dan penyuluhan dan monitoring kepada koperasi.

3. Sedangkan dekopin sebagai mitra pemerintah berperan penting melakukan pembinaan-pembinaan langsung dan pembenahan kepada koperasi-koperasi binaannya. Perlu diketahui bahwa belum ada koperasi sekunder yang terbentuk yang membawahi koperasi wanita.

Sedangkan paguyuban berperan juga dalam membina dan mengembangkan koperasi serta merupakan cikal bakal koperasi sekunder. Sayangnya masih belum berbadan hukum dan belum diikuti oleh seluruh koperasi wanita yang ada sehingga belum bisa memaksimalkan perannya.

Sementara itu pemerintah melalui Dinas Koperasi juga menjembatani sebagai penyalur pemasaran produk unggulan. Di samping itu juga pemerintah mensupport lewat pendidikan dan pembinaan serta bantuan hukum, memberikan informasi kalau ada KUR, bargaining power dengan bank pelaksana yang bekerjasama dengan pemerintah. Sayangnya pergantian pejabat dan personal di jajaran Dinas Koperasi yang sering terjadi dirasa sangat merugikan terhadap kelangsungan dan efektifitas program-program koperasi. Banyak program-program yang berhenti di tengah jalan serta pelatihan-pelatihan yang sifatnya hanya mengulang dari pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya.

3.2. Penerimaan Koperasi Wanita Terkait Program Pemerintah

Keberanian program 1 koperasi wanita di tiap kelurahan di Jawa Timur setidaknya-tidaknya telah membuktikan bahwa Pemerintah berani menepati janji konstitusi pada ps. 33 UUD 1945 bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran perseorangan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan, serta koperasi sebagai soko guru perekonomian.

Program pembentukan koperasi wanita dan dana bergulir dari pemerintah disambut positif oleh masyarakat khususnya kaum wanita di Kota Malang. Walaupun pada beberapa kasus karena pendiriannya lebih banyak unsur keterpaksaan karena di dorong program Pemerintah. Hal inilah menyebabkan keberhasilan implementasi di tiap-tiap koperasi wanita di Kota Malang bervariasi. Ada koperasi yang maju karena didukung SDM yang memadai khususnya di area tertentu serta ada yang tersendat-sendat karena minimnya SDM yang dimiliki. Bahkan pada suatu kasus ada koperasi yang anggotanya menjangkau kelurahan lain, di satu sisi ada koperasi yang tidak berkembang sama sekali. Hampir mayoritas koperasi wanita yang ada lemah dalam kaderisasi pengurusnya sehingga menyisakan SDM yang dari sisi usia sudah kurang produktif lagi.

Kopwan memiliki karakteristik yang khusus (berbeda dengan koperasi pada umumnya). Karena wanita lebih bertanggungjawab, memiliki rasa malu dan harga diri yang tinggi. Hal itu dibuktikan dengan rendahnya tingkat kredit macet yang terjadi pada Kopwan. Kaum wanita juga mempunyai karakter yang tidak sama dengan lelaki karena wanita mempunyai rasa tanggungjawab yang lebih besar dan guyub. Kepedulian yang tinggi (yang menjadi watak khas seorang wanita) ditunjukkan misalnya dengan mengunjungi anggotanya yang kurang aktif. Dengan adanya karakteristik-karakteristik yang positif tersebut bukan berarti kaum perempuan tidak memiliki negatif. Di Koperasi Wanita karena pengelolanya para wanita, wanita cenderung labil dan lebih mengandalkan perasaan daripada logika. Hal ini yang kemudian memberi celah pada beberapa kasus penyimpangan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai prosedur oleh beberapa oknum pengurus atau anggota Koperasi Wanita. Pada suatu kasus terjadi dana hibah digelapkan oleh ketua koperasi dengan cara mengeluarkan pencairan yang fiktif karena keluar masuk kas belum satu pintu ke bendahara melainkan ada keikutsertaan ketua dalam mengurus uang sehingga mengakibatkan kopwan ini di *blacklist* sehingga timbul kredit macet.

Salah satu kelemahan Kopwan adalah lemahnya sumberdaya koperasi wanita sehingga masih berat untuk disandingkan dengan swasta. Hal itu diperberat lagi dengan permodalan sangat minim, bagaimana bisa memberikan kontribusi yang besar jika hanya mengandalkan simpanan anggota. Intensitas pertemuan anggota yang sangat minim hanya 1 bulan sekali menjadi faktor lain yang menyebabkan lambatnya perkembangan Koperasi Wanita. Hal ini sudah disadari sejak lama oleh pengurus dan pembina koperasi.

Peran pengurus yang terkesan tidak mau tahu apakah dana pinjaman untuk konsumtif atau produktif, yang penting dana bisa berputar. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab perputaran dana masih banyak di sektor konsumtif anggota. Sementara itu tidak jarang terjadi anggota Kopwan yang memperoleh pinjaman modal usaha mengalami proses pengikisan modal karena usaha yang ditekuni berjalan stagnan, bahkan mengalami kemunduran karena masih belum mampu memisahkan modal usaha dengan keuangan keluarga.

Hasil yang dicapai oleh masing-masing Koperasi Wanita di Kota Malang sangat variatif. Masih ada kesenjangan yang lebar antara Koperasi Wanita yang maju dan yang tertinggal. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor sumberdaya manusia menjadi faktor kunci bagi Koperasi Wanita untuk bisa mengemban program dengan baik. Dorongan aktif dari pemerintah memerlukan sinergi searah yang positif dari sumberdaya manusia Koperasi Wanita, khususnya pengurus agar tujuan program dapat berjalan dan tercapai.

3.3. Hasil-Hasil Implementasi Program Pemerintah Tentang Koperasi Wanita Terhadap Pemberdayaan Kaum Perempuan

Adanya koperasi jelas sangat membantu kemudahan mendapatkan modal anggota daripada melalui bank swasta. Kalau melalui bank swasta harus melalui proses panjang, maka tidak jika melalui koperasi. Disamping bunga pinjaman lebih kecil anggota masih diuntungkan dengan perolehan SHU di akhir tahun.

Keberadaan koperasi juga memiliki peran penting dalam mengurangi hadirnya rentenir. Apalagi dengan adanya bantuan modal dari pemerintah sangat berarti bagi anggota kopwan. Awal mula berdiri kopwan digulirkan dana Hibah dari Pakdhe Karwo sebesar 25 juta, lalu pada periode kedua juga sebesar 25 juta, sehingga total 50 juta sudah diterima tiap-tiap koperasi wanita untuk dikembangkan. Dampaknya banyak anggota masyarakat yang berangsur-angsur meninggalkan jasa rentenir.

Anggota Koperasi Wanita juga mudah mendapatkan akses informasi-informasi keuangan misalnya kredit murah kerjasama dengan bank yang ditunjuk pemerintah.

Bagi sebagian kaum perempuan melalui Koperasi Wanita merupakan bentuk komitmen sekaligus kiprah mereka untuk beraktualisasi di ruang publik. Sehingga kehadiran lembaga ini sedikit banyak diakui juga telah merangsang tumbuhnya keterlibatan dan keberdayaan perempuan sebagai salah satu tiang penyangga ekonomi keluarga melalui berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang mereka kembangkan.

Dan yang terpenting adalah dapat menggerakkan usaha kecil yang berarti meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan memperluas lapangan kerja serta mengurangi pengangguran. Selain membantu permodalan, Kopwan merintis jaringan pemasaran untuk membantu pemasaran produk-produk anggota. Hasil-hasil produksi disuguhkan dan dipasarkan, *Contact Person* dari penjual/produsen disebarkan pada saat pertemuan-pertemuan. Satu-satunya kelemahan adalah manajemen usaha konvensional yang belum bisa memisahkan antara modal usaha dan keuangan keluarga sering menjadi penyebab usaha sulit berkembang.

Pelatihan dan bimbingan dari pihak-pihak terkait cukup gencar, tapi bagi anggota kopwan belum berdampak signifikan terhadap perkembangan usaha mikro, terkecuali pada beberapa anggota yang memiliki jiwa dan keterampilan wirausaha.

Hal tersebut menyiratkan pentingnya peranan pengurus untuk semakin meningkatkan upayanya menggerakkan anggotanya pada sektor-sektor ekonomi produktif.

Masalah klasik minimnya kontribusi dari antara lain disebabkan modal yang minim. Bola sudah ditangan, tanggungjawab pengurus yang menjadi kunci mau dibawa kemana bola yang sudah digulirkan.

Sulit untuk menyamai atau bahkan mengalahkan swasta sekalipun dukungan pemerintah cukup kuat. Pemerintah Jawa Timur mengklaim bahwa 50% PDRB disumbang oleh koperasi dan UKM. Hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut berapakah peran koperasi wanita dan UKM yang terkait dengan koperasi wanita itu sendiri. Karena dari narasumber partisipan

diketahui bahwa peran koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi mikro masih kecil karena modal yang masih terbatas dan mayoritas modal koperasi dibelanjakan oleh anggota pada sektor konsumtif.

IV. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Dari analisis data dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Koperasi wanita mempunyai karakteristik khas yang berbeda dengan koperasi pada umumnya sehingga membutuhkan pendekatan strategi pengembangan yang berbeda pula. Hal ini tak bisa terlepas dari karakteristik anggotanya di dominasi ibu rumah tangga menyebabkan keunggulan tersendiri dibandingkan koperasi lain. Namun dari sisi intensitas pertemuan yang sangat kurang menjadi faktor penting menyebabkan lambatnya perkembangan kopwan.

Kebijakan Pemerintah Jawa Timur cukup besar terhadap tumbuh kembangnya Kopwan. Disamping itu ada program-program pemberdayaan di tingkat Daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM dan pembinaan melalui Dekopin. Dukungan dari berbagai lembaga membutuhkan peran pengurus kopwan sebagai aktor kunci untuk menggerakkan anggotanya di bidang ekonomi produktif bukan konsumtif.

Walaupun lambat namun pasti keberadaan kopwan memberikan manfaat yang cukup besar bagi anggotanya yang notabene para ibu rumah tangga. Pemerataan modal bisa dirasakan dengan adanya bantuan dana hibah di tiap kelurahan. Namun masih ada hal-hal yang perlu dibenahi agar perkembangannya bisa dipercepat dan semakin optimal.

4.2. Saran

Pentingnya untuk menemukan strategi untuk meningkatkan intensitas interaksi anggota koperasi agar lebih aktif sehingga diharapkan lebih cepat berkembang

Pentingnya posisi pengurus kopwan sebagai aktor kunci dalam mengemban program koperasi sehingga pemerintah dan pihak-pihak terkait hendaknya lebih fokus pada pemberdayaan pengurus koperasi khususnya agar sinergi dengan program pemerintah.

Perlunya strategi untuk mengubah paradigma konsumtif menjadi produktif agar modal yang ada betul-betul dapat maksimal implikasinya pada peningkatan kesejahteraan melalui ekonomi produktif

DAFTAR PUSTAKA

- 8.000 Koperasi Wanita di Jatim Dapat Bantuan Modal - Kompas.com, 12 Maret 2010, diunduh 25 Juni 2017, dari <http://nasional.kompas.com/read/2010/03/12/21533533/8.000.koperasi.wanita.di.jatim.dapat.bantuan.modal>
- Anoraga, P., Sudantoko, H. D., & Indonesia, 2002, Koperasi, kewirausahaan, dan usaha kecil, Penyalur tunggal, Rineka Cipta
- Arifin, Zaenal Prof. DR., 1994, Dasar Dasar Penulisan Karya Ilmiah, Penerbit: PT Grasindo, Jakarta.
- Cerita Menkeu tentang Kebangkitan Koperasi yang Masih Sekadar Jargon - Kompas.com, 3 Juni 2016, diunduh 25 Juli 2017, dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/03/184147626/cerita.menkeu.tentang.kebangkitan.koperasi.yang.masih.sekadar.jargon>
- Ironi Koperasi sebagai Saka Guru Perekonomian Bangsa - Kompas.com, 5 Agustus 2016, diunduh 22 Juni 2017, dari <http://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/05/182827126/ironi.koperasi.sebagai.saka.guru.perekonomian.bangsa>
- Jatim Dirikan 4.250 Koperasi Wanita - Kompas.com, 8 Februari 2010, diunduh 22 Juni 2017, dari <http://ekonomi.kompas.com/read/2010/02/08/11562615/jatim.dirikan.4.250.koperasi.wanita>
- Koperasi Wanita Berdampak Positif - Kompas.com, 11 Juli 2019, diunduh 25 juli 2017, dari <http://nasional.kompas.com/read/2009/07/11/17203414/koperasi.wanita.berdampak.positif>

- Lincoln dan Guba, 1985, YS dan Egon GB, 1985, *Naturalistic Inquiry*, London : Sage Publication.
- Lindolf, T., 1995, *Qualitative communication research methods*, Thousand Oaks, CA, Sage Publishing.
- Miles, Mathew B, dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, Penerjemah, Tjejep Rohendi, UI-Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi , PT. Remaja Rosda Karya Bandung.
- Pinjaman LPDB Macet Rp 300 Miliar, 8 Koperasi di Sulsel dan Sulbar Jalani Proses Hukum - Kompas.com, 23 Juli 2016, diunduh 22 Juni 2017, dari <http://ekonomi.kompas.com/read/2016/07/25/140000826/pinjaman.lpdb.macet.rp.300.miliar.8.koperasi.di.sulsel.dan.sulbar.jalani.proses.hukum>
- Ropke, J. 2003. *Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen*. Diterjemahkan oleh Hj. Sri Djatnika S. Arifin. SE. M.Si. Penerbit Salemba Empat
- Todaro, M. P., & Smith, S. C., 2015, *Economic development* (Twelfth edition), Boston: Pearson
- Republik Indonesia, 1967, UU Nomor 12 tahun 1967 tentang Perkoperasian
- Republik Indonesia, 1992, UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Republik Indonesia, 2008, UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Republik Indonesia, 2012, UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Yin, R.K., 2002, *Studi Kasus Desain dan Metode*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.